

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
2. Terhadap proses pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau belum sepenuhnya memadai, karena masih dijumpainya beberapa permasalahan dan kelemahan antara lain : Adanya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan dan rangkaian kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan anggaran maka akan terjadi perubahan jumlah permintaan dana pada setiap waktu yang akan dipergunakan untuk kepentingan yang akan dibuat maupun yang sedang berjalan, serta pemasukan dan pengeluaran yang ada pada instansi pemerintah tersebut.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi (PP No.27 Tahun 2014) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab tersebut di atas dan pada beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik tidak terlepas dari pengetahuan dan kemampuan aparatur terkait, oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau perlu meningkatkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah dan harus lebih bijak dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah agar tercipta kualitas yang lebih baik guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam rangka pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Keuangan daerah pada intansi terkait harusnya dipergunakan untuk hal yang wajar, agar kemudian hari anggaran daerah tidak merugikan Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau hendaknya perlu ditingkatkan.

